

DISKURSUS “*ILLEGITIMATE SEXUAL ACTIVITY*” ANAK BANGSA DALAM PERSPEKTIF TABLOID INDONESIA

Oleh: Nisa Kurnia I, S.Sos
Mahasiswa Paska Sarjana Jurusan Media Komunikasi FISIP
Universitas Airlangga
Email: looneymochi@gmail.com

ABSTRAK

In Indonesia, a sexual activity that has not been legitimized by the state is one of the realities that are constructed by the language of "masculine-heterosexual". Which in that context is an absolute discourse defines in the hands of the state. The construction is also valid in defining the reality of “porn” video made by some people that’s look alike with “Ariel-Luna Maya-Cut Tari”, which is mainly carried out by the mass media. This paper is about to dismantle more about the use of "masculine-heterosexual" language by the Indonesian mass media discourse in defining and putting illegitimate sexual activity in the landscape of the nation's sexuality discourse in Indonesia. To map that discourse, I use several tabloids that frames the case of celebrity porn videos that could suppress the euphoria of World Cup 2010, in Indonesia.

I’m using four tabloids to dismantle the constellation discourse of the nation's children illegitimate sexual activity that’s taking place in Indonesia. Represented by the discussion of celebrity (as part of the youth of the nation), porn video cases. The election of tabloids as the object of observation is not without implications, given the tabloid is a media that basically has lower-class segmentation, first indicator is the price that is in the range of 6000-7000 IDR and basic materials using newspaper, not glossy paper. As we all know, until now that class has a significant amount of class stratification in Indonesia. Thus, the basic assumptions used for this paper is that according to these class, the issue of illegitimate sexual activity has a high degree of urgency to be discussed. Considering they became a major issue in all tabloids that was circulated at that time. Four tabloids that I use is, Tabloid Nova No. 1165/XXIII 21 to 27 June 2010, the tabloid Star Edition 997 Year XX Third Sunday in June 2010, Tabloid Wanita Indonesia No. 1069 21 to 27 June 2010, and the last is Genie Tabloid Edition 50 Years to VI, 21 to 27 June 2010.

The case of illegitimate sexual activity involving children of the nation, especially in the context of this research is a celebrity, actually not the first in Indonesia. However, that cause sticking up in the top of discourse are the perpetrators who were located at the peak of popularity. As expressed by O’Guinn (2003), "Society of the 21st century is all about celebrity." Moreover, the Indonesian people are fed seasoned celebrity impressions each day with an intensity that can not be categorized as small, to consider the life of celebrity become a staple food that is not be missed. Apart from infotainment shows on television, one of the vanguard of the mass media that make celebrity as basic material is tabloid. Becomes

interesting when a tabloid article presenting subtle articulation on the of discourse nation's child illegitimate sexual acitivity.

Based on the discussion in this paper, I can conclude that the discourse of nation's child illegitimate sexual activity which is documented, is still a problematic matter for tabloid in Indonesia. Using the perspective of critical multiculturalism, Indonesia 's tabloids is still in the favorable position of ideological hegemony of dominant discourse following the heteronormative discourse. Defining the phenomenon was taken from the perspective of nation that put the discourse of sexuality in the periphery of nation identity. So the discourse of nation's child's illegitimate sexual activity served as indicators of nation morality at once, a disgrace which must be repressed by public law because causing "damage" to nation's morality.

Keywords: *nation identity, illegitimate sexual activity, Indonesian's tabloid.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, sebuah aktivitas seksual yang belum dilegitimasi oleh negara merupakan salah satu realitas yang dikonstruksi oleh bahasa "maskulin-heteroseksual"¹. Pengkonstruksian tersebut juga berlaku dalam pendefinisian realitas video mirip Ariel-Luna Maya-Cut Tari, yang utamanya dilakukan oleh media massa. Tulisan ini hendak membongkar lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa "maskulin-heteroseksual" oleh media massa Indonesia dalam mendefinisikan serta meletakkan diskursus *illegitimate sexual activity* anak bangsa dalam lanskap diskursus seksualitas Indonesia. Untuk memetakan diskursus itu, saya menggunakan beberapa tabloid yang membongkar kasus *celebrity porn video* yang sanggup menyaingi gempita World Cup 2010², di Indonesia.

Kasus *illegitimate sexual activity* yang melibatkan selebriti ini sebenarnya bukan yang pertama di Indonesia. Namun, yang menyebabkannya mencuat di puncak diskursus adalah para pelakunya yang tengah berada pada puncak popularitas³. Seperti yang diungkapkan oleh O'Guinn (2003)⁴, "Masyarakat abad ke-21 segalanya adalah mengenai selebriti". Apalagi masyarakat Indonesia yang dicekoki tayangan berbumbu selebritas tiap hari dengan intensitas yang tidak bisa dikategorisasikan sebagai sedikit, hingga menganggap kehidupan selebritas menjadi makanan pokok yang tidak mungkin dilewatkan⁵. Selain acara *infotainment* di televisi, salah satu media massa garda depan yang menjadikan selebritas sebagai bahan dasarnya adalah tabloid.

¹ Untuk detailnya, lihat: Alimi, Moh Yasir. (2004). Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial: Dari Wacana Bangsa Hingga Wacana Agama. Jogjakarta: LKiS. Hal. 64.

² Menurut Tabloid Bintang. Edisi 997 Tahun XX Minggu Kedua Juni 2010. Hal. 3.

³ Untuk detailnya lihat: Tabloid Nova No. 1165/XXIII 21-27 Juni 2010. Hal. 3.

⁴ Dikutip dari: Ibrahim, Idi Subandy (2007) Budaya Populer Sebagai Komunikasi: Dinamika Popscape dan Mediascape di Indonesia Kontemporer. Bandung : Jalasutra. Hal. 133.

⁵ Disarikan dari: Haryanto, Ignatius (2006) Aku Selebriti Maka Aku Penting. Jogjakarta: Penerbit Bentang. Hal. 5.

Menjadi semakin problematis manakala pasangan selebritis yang tengah disorot tersebut menjadi salah satu pasangan “panutan”⁶ bagi para remaja Indonesia. Selain status sebagai selebritis, kedua individu tersebut memiliki status lain sebagai bagian dari bangsa Indonesia, saya menggunakan istilah anak bangsa. Kasus *illegitimate sexual activity* di Indonesia yang dilakukan oleh para remaja semakin meningkat tiap tahunnya, ditambah lagi dengan semakin canggihnya teknologi komunikasi yang digunakan untuk mendokumentasikan sekaligus menyebarkan aktivitas tersebut. Fenomena ini seolah-olah memecahkan puncak gunung es kasus *illegitimate sexual activity* yang banyak mencuat pada kondisi realitas Indonesia. Urgensi untuk “meluruskan” diskursus *illegitimate sexual activity* mulai muncul manakala seksualitas sebagai salah satu bagian dari identitas nasional bangsa mulai dipertanyakan.

Identitas nasional sendiri merupakan salah satu konsep yang problematis di Indonesia. Anggapan bahwa identitas nasional merupakan sesuatu yang *given* dan karenanya mutlak dilekatkan pada tiap individu, sehingga mengarahkan segala tingkah laku mengikuti standar nilai “nasional” tersebut, menyebabkan berbagai problem yang paradoksal. Sesuai dengan pemikiran Anderson⁷ yang mendefinisikan bangsa sebagai “*an imagined political community-and imagined as inherently limited and sovereign*”, sehingga konstruk sebuah kondisi kebangsaan pada dasarnya merupakan diskursus ideology yang dibayangkan. Menjadi menarik manakala bangsa yang pada dasarnya dibentuk dari beragam latar belakang sosial budaya ditransformasikan menjadi suatu konsep “nasional” yang memiliki nilai seragam.

Inilah yang menyebabkan bangsa menjadi sebuah fenomena modern, sejarah dan kebersamaan yang dibentuk dan dibayangkan, dengan cepat dan secara terus-menerus, oleh banyak orang. Bangsa kemudian menjadi ada melalui sebuah *system of signification*⁸. Karenanya, kebangsaan merupakan sebuah bayangan yang dibangun dan direproduksi terus-menerus melalui system pemaknaan serta bahasa yang digunakan oleh individu dalam kehidupan kesehariannya di dalam masyarakat. Menurut Hall, nilai-nilai dasar kebangsaan tersebut dibentuk dari *the narrative of nation* (1992;293)

A set of stories, image, landscapes, scenarios, historical events, national symbols and rituals which stand for or represent the shared experience which give meaning to the nation.

Reproduksi nilai-nilai kebangsaan melalui sistem penandaan tersebut turut mengkonstruksi sebuah konsep seksualitas yang dianggap “pantas” oleh negara untuk dilekatkan pada tiap warganya.

Akibat dari reproduksi konsep kebangsaan melalui sistem penandaan tersebut, konstruksi mengenai identitas individu yang menjadi anggota suatu

⁶ Di situs-situs jejaring sosial, keduanya memiliki website khusus untuk penggemar yang menjadikan mereka sebagai “panutan” dengan anggota 4.688 orang. Lihat: <http://www.facebook.com/74677948965/>

⁷ Dikutip dari: Anderson, Benedict. (1983) *Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism*, London: Verso. Hal. 5-6.

⁸ Disarikan dari Ibid, Hal. 40.

bangsa pada dasarnya akan selalu berubah bergantung pada penguasa sistem penandaan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Foucault⁹:

But we know very well that, in its distribution, in what it permits and what it prevents, it follows the lines laid down by social differences, conflicts and struggles. Every educational system is a political means of maintaining or modifying the appropriation of discourses, with the knowledge and power they bring with them.

Sehingga diskursus ke”bangsaan” menjadi terartikulasikan dalam penggunaan bahasa sehari-hari dalam membingkai sebuah realita. Realita yang bersinggungan langsung dengan lokus identitas, seperti etnisitas, agama, kelas, wilayah serta gender dan seksualitas menjadi bergantung pada penggunaan bahasa tersebut untuk mendefinisikannya. Termasuk dalam kasus video “mirip” artis tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Foucault¹⁰, heteroseksualitas bukan hanya didirikan di atas naturalisasi dan pelipatgandaan tingkah laku seksual yang prokreatif, melainkan juga pada patologisasi, abnormalisasi setiap bentuk praktik seksual yang nonprokreatif. Sehingga bagi setiap aktivitas seksual yang dinilai nonprokreatif, yang dalam konteks paper ini adalah *illegitimate sexual activity* didefinisikan sebagai sesuatu yang patologis.

Pemerintah Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru yang mengusung konsep Negara integralistik¹¹ menganalogikan Negara dengan konsep azas kekeluargaan. Dengan kata lain, Negara sebagai keluarga yang memiliki dasaran UUD 1945 sehingga menggunakan Patrimonialisme¹² sebagai landasan struktur pelapisan sosial di Indonesia, dengan Presiden sebagai Bapak Utama. Terdapat ciri hubungan kawula-gusti¹³ yang kuat dalam budaya politik Jawa, yang ditandai oleh hormat pada kekuasaan dan otoritas, yang sejalan dengan hirarkhi. Salah satu slogan yang diusung Orde Baru adalah proyek “Pembangunan Nasional” yang membutuhkan pemerintah yang kuat, stabil dan berwibawa, yang didukung oleh aparat Negara yang “sempurna”, salah satunya adalah keluarga sebagai bagian integralistik dari negara. Seperti yang disampaikan oleh Reksosoedirdjo (1990)¹⁴

Rumah tangga adalah merupakan unit masyarakat yang terkecil dari sebuah negara ... Negara hanya akan kuat apabila terhimpun dari

⁹ Untuk detailnya, lihat: Foucault, Michel (1968) “Discourse, Power and Knowledge”, dalam *The Will to Truth*. New York: Tavistock Publication. Hal. 127.

¹⁰ Kutip Alimi

¹¹ Merupakan suatu konsep Negara yang melihat masyarakatnya sebagai suatu kesatuan organis, di mana individu dan kelompok menjadi bagian dari keseluruhan. Untuk detailnya, lihat Suryakusuma, Julia I (1991) “Seksualitas dalam Pengaturan Negara” dalam Hadiz, Liza (editor). (2004) *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru: Pilihan Artikel Prisma*, Jakarta: LP3S. Hal 355.

¹² Suatu ideologi yang menggabungkan laki-laki dan perempuan dalam satu konteks yang integral (rumah tangga).

¹³ Kawula=saya (digunakan sebagai kata ganti orang dengan kedudukan yang lebih rendah). Gusti = penguasa.

¹⁴ Dikutip dari Suryakusuma, Julia I. 1991. “Seksualitas dalam Pengaturan Negara” dalam Hadiz, Liza (editor). 2004. *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru: Pilihan Artikel Prisma*, LP3S: Jakarta. Hal. 360. Untuk lebih detailnya lihat: Drs. Waskita Reksodsoedirdjo, “Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri”, Mata pelajaran pada Dharma Wanita unit Lemsetitina, Jakarta, 17 Mei 1990, hal. 7.

rumah tangga-rumah tangga yang kuat. Negara yang adil hanya akan terwujud dari susunan rumah tangga yang adil.

Oleh karena itu menegakkan sebuah rumah tangga berarti ikut berpartisipasi menegakkan suatu Dasar Negara.

Pandangan konstruksi identitas nasional bangsa yang didengungkan pada masa Orde Baru ternyata masih direproduksi pada masa reformasi. Sesuai dengan pandangan heteronormativitas yang lebih memihak pada politik maskulin, Negara sebagai manifestasi puncak dari konsep “keluarga” tersebut memiliki kewajiban untuk “menjaga” anak-anak bangsa mereka menggunakan *ideological state apparatus* yang salah satunya diartikulasikan oleh media massa. Untuk mempertahankan diskursus kebangsaan yang sesuai dengan identitas nasional maka seluruh proses yang menggunakan sistem penandaan dikonstruksi sedemikian rupa sehingga berjalan selaras dengan *the narrative of nation*.

Pendefinisian mengenai gender dan seksualitas sebagai salah satu lokus identitas individu sendiri selalu mengalami perdebatan. Menurut Judith Butler (1999)¹⁵, gender itu bersifat performatif, hal ini menyatakan secara tidak langsung bahwa identitas gender seseorang dihasilkan melalui penampilan (*performance*) dan permainan peran (*role-playing*). Pengulangan memainkan peran penting dalam proses ini, karena dengan menampilkan tindakan-tindakan tertentu secara berulang individu memperoleh sebuah identitas koheren yang nyata. Selanjutnya pengulangan didikte oleh seperangkat tata nilai yang berupa ekspektasi oleh budaya tertentu terhadap anggotanya, oleh ideologi dominan dan cara-cara mengatur perilaku seksual.

‘Performa gender’, menurut Butler, bergantung pada praktik-praktik pengulangan rezim-rezim seksual yang bersifat mengendalikan. Sebuah peran gender, oleh karenanya, tidak bersifat alami maupun opsional. Pada kenyataannya peran gender terkonstruksi oleh pelbagai wacana kultural, dan khususnya oleh bahasa. Melalui kegiatan mendisiplinkan tubuh dan menyesuaikan dengan performa gender yang dituntut oleh lingkungan sosiokultural akan memungkinkan terjadinya, apa yang disebut Foucault sebagai “ledakan diskursus seksualitas”. Menurut Foucault (1988)¹⁶, seksualitas merupakan ruang yang paling dalam tempat terkuburnya kebenaran tentang diri, sebagai inti esensial yang mendasari kesadaran rasional yang mungkin muncul dan membentuk identitas.

Sebagai respon atas pemikiran tersebut, Yuval Davis (1977)¹⁷ mengungkapkan bahwa seksualitas memainkan peranan penting dalam reproduksi bangsa secara sosial (*the social production of nation*) atau disebut juga dengan kulturenation dan reproduksi bangsa secara biologis (*the biological production of nation*) atau disebut juga sebagai volknation.

Melalui kulturenation, relasi gender dan seksual digunakan sebagai pusat pembentukan identitas nasional. Sementara volknation, digunakan untuk

¹⁵ Untuk lebih jelasnya lihat: Butler, Judith (1999) “Gender Trouble” dalam *Feminism and The Subversion of Identity*. London : Routledge. Hal. 25.

¹⁶ Diambil dari Alimi, Moh Yasir (2004) Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial: Dari Wacana Bangsa Hingga Wacana Agama. Jogjakarta: LKiS. Hal. 76.

¹⁷ Diambil dari Ibid.

mengamankan integritas bangsa, batas dan fungsi tubuh diatur ketat. Batas-batas ditentukan, dijaga, dan para penyimpang seksualnya diidentifikasi melalui teknik-teknik baru pengetahuan, dan dieksklusi melalui teknik “kuasa” sehingga bangsa dapat mengkonsolidasikan pemahaman komunitas yang lebih kuat. Sejalan dengan pemikiran tersebut, proses pendefinisian sebuah praktik seksual menjadikan “*the narrative of nation*” sebagai acuan utama.

Saya menggunakan empat tabloid untuk membongkar konstelasi diskursus *illegitimate sexual activity* di Indonesia yang direpresentasikan oleh kasus *celebrity porn video* tersebut. Pemilihan tabloid sebagai objek pengamatan bukannya tanpa implikasi, mengingat tabloid merupakan suatu media yang pada dasarnya memiliki segmentasi kelas bawah, salah satu indikatornya adalah harganya yang berada pada kisaran 6000-7000 rupiah serta bahan dasarnya yang dari kertas koran, bukan *glossy*¹⁸. Sehingga, asumsi dasar yang digunakan bahwa menurut kelas tersebut, isu *illegitimate sexual activity* masih menjadi diskursus seksualitas yang memiliki tingkat urgensi cukup tinggi mengingat peletakkannya sebagai isu utama di semua tabloid yang tengah beredar pada masa ini. Keempat tabloid yang saya gunakan adalah, Tabloid Nova No. 1165/XXIII 21-27 Juni 2010, Tabloid Bintang Edisi 997 Tahun XX Minggu Ketiga Juni 2010, Tabloid Wanita Indonesia No. 1069 21-27 Juni 2010, dan yang terakhir adalah Tabloid Genie Edisi 50 Tahun ke VI, 21-27 Juni 2010.

Tabloid merupakan sebuah produk budaya yang dibuat oleh suatu institusi media massa yang notabene merupakan bagian dari masyarakat sosial itu sendiri. Menurut McQuail (2000)¹⁹, tabloid (media massa), budaya (*culture*), dan masyarakat (*society*) adalah tiga hal yang tidak dapat dipisahkan. Tabloid merupakan suatu produk budaya yang memanifestasikan gagasan-gagasan suatu masyarakat mengenai suatu realita (objek). Objek tersebut tidak serta merta ditampilkan sebagaimana adanya, melainkan mengalami sebuah presentasi ulang yang merupakan hasil konstruksi pihak yang memproduksi teks tersebut.

Bahasa populer untuk realitas kedua ini adalah representasi. Menurut Hall (2002)²⁰, yang dimaksud dengan representasi adalah suatu aktivitas komunikasi yang menggunakan bahasa yang memiliki makna tertentu yang didefinisikan secara sosio-kultural untuk menggambarkan, mewakili, atau mempresentasikan ulang suatu objek (atau realita). Sehingga proses representasi pada dasarnya adalah proses mengkonstruksi ulang realita melalui bahasa yang memiliki pemaknaan konsensual.

Karena merupakan suatu produk budaya, keberadaan tabloid tidak akan pernah lepas dari institusi yang memproduksinya tersebut²¹. Dalam institusi

¹⁸ Penggunaan kertas *glossy* adalah salah satu indikator dari media massa yang ditujukan untuk kelas menengah. Untuk lebih jelasnya, lihat: McLaughlin, Linda (2000) *The Language of Magazines*. New York: Routledge. Hal. 5.

¹⁹ Diambil dari McQuail, Dennis (2000) “Theory of Media and Theory of Society” dalam *Mass Communication Theories*, London: Sage Publication. Hal. 61.

²⁰ Untuk detailnya lihat Hall, Stuart (2002) “The Work of Representation” dalam Hall, Stuart (editor). 2002. *Representation; Cultural Representations and Signifying Practices*. London: Sage Publication. Hal. 15.

²¹ Untuk detailnya lihat: Strinati, Dominic (2007) *Popular Culture: Pengantar Menuju Teori Budaya Populer*. Bandung: Penerbit Jejak. Hal. 5.

pembuat tabloid ini terdiri dari beberapa individu yang memiliki kuasa untuk mengkonstruksi ulang realita yang ingin ditampilkan dalam film, seperti pimpinan redaksi, editor, *lay outer* atau bahkan penulisnya. Individu-individu tersebut tentunya bagian dari masyarakat yang memiliki seperangkat tata nilai yang dipercayai selama turun-temurun dalam bentuk budaya. Sehingga representasi yang mereka ciptakan dalam tabloid, kurang lebih akan merepresentasikan ideologi mereka mengenai kondisi ideal suatu masyarakat.

Bentuk representasi realitas ideal ini pada akhirnya menjadi suatu praktik diskursif yang dijalankan oleh sistem masyarakat untuk melanggengkan *status quo* mereka. Dapat dikatakan bahwa melalui tabloid, institusi yang memproduksinya juga melakukan penetrasi ideologi terhadap para pembacanya dalam bentuk representasi realitas tersebut. Sehingga sedikit banyak dapat dikatakan bahwa praktik diskursif yang berlangsung dalam sebuah tabloid, sebenarnya juga tengah berlangsung dalam realitas sosial masyarakat itu sendiri. Praktik-praktik diskursif tersebut pada akhirnya memproduksi, mereproduksi, atau bahkan melanggengkan wacana yang mendukung suatu kekuasaan dominan yang menghasilkan “*common sense*” atau “*taken for granted*” bagi publik yang mengkonsumsinya.

Dapat dikatakan bahwa tabloid menampilkan suatu realitas simbolis yang merupakan representasi dari realitas faktual yang terjadi di lingkungan sosial. Realitas simbolis ini diproduksi melalui interaksi simbolis yang dibentuk oleh bahasa dan konvensi (pemaknaan bersama)²². Sehingga penggunaan bahasa yang digunakan untuk merepresentasikan realitas tersebut menjadi bias dan tidak bebas nilai. Karena dalam setiap pemilihan bahasa yang hendak digunakan selalu ada nilai-nilai yang melekat dalam penggunaan bahasa tersebut. Penggunaan bahasa di sini tidak hanya terbatas pada kata-kata, melainkan juga pada atribut, gestur, serta bahasa-bahasa tabloid seperti *angle*, *plot*, ataupun *layout*²³. Jadi, pada dasarnya realitas simbolis yang ada pada tabloid memberikan penawaran nilai-nilai tertentu kepada pembacanya mengenai kondisi masyarakat yang ideal.

Menggunakan pendekatan ‘*critical multiculturalism*’, penulis hendak membedah konstelasi wacana multikulturalisme dan seksualitas yang berusaha diartikulasikan melalui artikel-artikel dalam keempat tabloid yang digunakan sebagai sampel. Pendekatan ini digunakan untuk melihat ‘*the struggle of power*’ dalam sebuah teks, yang dalam konteks penelitian ini adalah diskursus multikulturalisme dan seksualitas. Seperti yang disampaikan oleh Kellner²⁴:

“Multicultural” here thus functions as a general rubric for all those attempts to resist the stereotyping, distortions, and stigmatizing by the dominant culture. A critical multiculturalism also works to open cultural studies to analysis of the relations of force and domination in society and the ways that these are covered over and/or legitimated in dominant ideological representations.

²² Untuk detailnya, lihat: Fiske, John (1996) “Communication, Meaning and Sign” dalam *Introduction to Communication Studies*. London: Routledge. Hal. 53-56.

²³ McLaughlin, Linda (2000) *The Language of Magazines*. New York: Routledge. Hal. 8.

²⁴ Dikutip dari Kellner, Douglas (1995) *Media Culture*. New York: Routledge. Hal. 95-6.

Sehingga teks artikel yang akan dianalisis pada akhirnya akan memaparkan sebuah konstelasi diskursus seksualitas, utamanya *illegitimate sexual activity* dan multikulturalisme yang mengkaitkan antara representasi ideologis dengan situasi sosio-kultural realita yang melingkupi teks tersebut. Kemudian tulisan ini juga akan memperlihatkan resistensi teks untuk mempertahankan *status quo* diskursus seksualitas nasional melalui artikel-artikel yang ditampilkan.

Untuk memaparkan realitas seksualitas dan multikulturalisme tersebut, penulis akan memperhatikan beberapa elemen. Karena sebuah pendekatan *critical multiculturalism* memiliki perspektif yang cukup luas, sehingga penilaian mengenai realitas multikultur harus disarikan dari berbagai elemen pembentuk diskursus. Seperti yang diungkapkan oleh Kellner²⁵:

A critical multicultural perspective takes seriously the conjunction of class, race, ethnicity, gender, sexual preference, and other determinants of identity as important constituents of culture which should be carefully scrutinized and analyzed in order to detect sexism, racism, classism, homophobia, and other tendencies that promote domination and oppression.

Untuk itu, saya akan memaparkan pemosisian pelaku dan korban, serta peran serta saksi ahli yang memiliki legitimasi pengetahuan untuk menjustifikasi kebenaran video tersebut, kemudian sanksi sosiokultural maupun yudisial yang ditimpakan pada para anak bangsa sebagai partisipan dalam *illegitimate sexual activities* tersebut, dan yang terakhir posisi negara sebagai puncak legitimasi seksualitas, untuk menganalisis bagaimana diskursus seksualitas dalam perspektif *critical multiculturalism* dalam artikel-artikel yang ditampilkan oleh tabloid-tabloid tersebut. Dengan pendekatan ini diharapkan hasil analisis yang lebih komprehensif. Pertanyaan utama yang akan dijawab melalui tulisan ini adalah bagaimanakah artikel-artikel dalam tabloid Indonesia mengartikulasikan diskursus seksualitas anak bangsa, utamanya *illegitimate sexual activity*, melalui sistem penandaan, menggunakan perspektif multikulturalisme kritis.

DISKUSI

Siapa Pelaku, Siapa Korban?

Salah satu perdebatan yang timbul dari munculnya kasus ini adalah mengenai posisi pelaku dan korban. Dari judul yang terpampang di sampul depan tabloid-tabloid tersebut sudah tampak penggunaan sistem penandaan yang mengartikulasikan pandangan mereka mengenai posisi korban dan pelaku. Judul yang diusung oleh Tabloid Nova yaitu “Main Api Terbakar Sendiri” jelas memposisikan para anak bangsa yang terlibat sebagai pemain video tersebut sebagai pelaku yang sudah selayaknya mendapat hukuman. Penggunaan metafora main api terbakar sendiri, memiliki makna denotatif bahwa para pemeran dalam video tersebut telah melewati batas-batas norma kesusilaan di Indonesia sehingga mereka “wajar” memperoleh akibatnya.

Sudut pandang lain ditampilkan oleh Tabloid Genie yang memilih judul utama “Video itu Asli; Ariel hanya Memanfaatkan Luna”. Posisi korban

²⁵ Dikutip dari Ibid.

disandingkan pada Luna sebagai objek pasif dari pelaku Ariel sebagai subjek aktif. Posisi ini ditentukan oleh penggunaan kata “memanfaatkan”. Bahasa maskulin ini juga melegitimasi bahwa perbuatan mereka tidak prokreatif karena menimbulkan kerugian bagi pihak lain, yang dalam hal ini adalah Luna. Sementara Tabloid Bintang yang menggunakan judul utama “Imej dan Karier Berantakan, Ariel-Luna Tetap Tak terpisahkan”, menawarkan sudut pandang lain bahwa *illegitimate sexual activity* akan memberikan konsekuensi buruk bagi kehidupan individu yang melakukannya. Walaupun tabloid ini tidak menawarkan posisi pelaku atau korban, namun secara gambling tabloid ini mengusung diskursus dominan bahwa *illegitimate sexual activity* adalah kesalahan yang harus mendapat hukuman.

Tabloid Bintang merupakan salah satu tabloid yang memaparkan perdebatan posisi pelaku-korban dari berbagai perspektif. Tidak hanya menghakimi anak bangsa pelaku *illegitimate sexual activity* secara sepihak, Bintang mencoba untuk memberikan wadah bagi para “pelaku” adegan-adegan tersebut untuk membeberkan perasaan mereka.

Dalam sesi wawancara itu, berkali-kali Luna-Ariel menekankan mereka korban dari orang-orang yang ingin melihat karier mereka hancur²⁶.

Pada dasarnya, para partisipan *illegitimate sexual activity* merasa menjadi korban dengan beredarnya video tersebut, dan mereka menempatkan para pengganda video tersebut sebagai pelaku. Senada dengan bintang, Tabloid Genie juga menyuarakan hal serupa, bahwa tidak ada ruginya meminta pihak yang bersangkutan secara langsung dalam memberikan pandangan mereka terhadap masalah tersebut. Walaupun sebagai implikasi logis dari beredarnya dokumentasi tersebut menimbulkan efek domino bagi korban-korban lainnya.

Menggunakan *angle* yang berbeda, Bintang juga memaparkan pendapat individu-individu yang dianggap memiliki legitimasi akan kebenaran mengenai siapa yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi korban.

“Masalah utamanya, penyebaran video porno yang tidak terbendung dengan cara yang jahat, secara sengaja, dan sistematis. Jadi kalau ada yang menyebut Luna dan Ariel korban, harusnya kita melihat lebih luas lagi. Korban sebenarnya masyarakat luas. Bukan mereka”²⁷.

“Masalah video itu cukup menguras perhatian publik. Kalau itu benar mereka, bukan saya saja yang kecewa. Mereka ini idola puluhan juta jiwa anak muda Indonesia...Menurut saya, korban sebenarnya anak-anak. Mereka bisa saja meniru”²⁸.

Tabloid Bintang mengutip pernyataan Ade Armando, seorang pengamat media yang telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Ade Armando yang dianggap memiliki kredibilitas untuk menanggapi kasus ini menyatakan bahwa korban yang

²⁶ Dikutip dari: Tabloid Bintang Edisi 997 Tahun XX Minggu Ketiga Juni 2010. Hal.3.

²⁷ Wawancara dengan pengamat media, Ade Armando. Dikutip dari: Tabloid Bintang Edisi 997 Tahun XX Minggu Ketiga Juni 2010. Hal.2.

²⁸ Wawancara dengan Menkominfo, Tifatul Sembiring. Dikutip dari: Tabloid Bintang Edisi 997 Tahun XX Minggu Ketiga Juni 2010. Hal.4.

lebih luas adalah masyarakat Indonesia, dan para pelaku video tidak sepatutnya memposisikan diri mereka sebagai korban. Pernyataan ini ditekankan kembali oleh tabloid Bintang menggunakan pernyataan Tifatul Sembiring, Menkominfo Kabinet Indonesia Bersatu II. Korban sebenarnya adalah anak-anak, yang ditekankan oleh Tifatul sebagai penggemar Ariel dan Luna, yang bias saja meniru perbuatan mereka.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, kondisi sebuah negara yang sistemik pada akhirnya menempatkan sebuah diskursus seksualitas pada jalinan diskursus identitas nasional pada sebuah masyarakat. Sehingga, tidak heran jika bagi media massa, selalu ada berbagai macam versi yang merujuk pada pelaku maupun korban dari kasus tersebut. Namun, dengan melihat paparan dari tabloid Bintang, bisa dilihat kecenderungan angle yang lebih memihak pada diskursus identitas nasional yang menempatkan anak bangsa yang berpartisipasi dalam video sebagai pelaku dan masyarakat luas sebagai korban.

Jika Bintang berusaha menampilkan dari berbagai perspektif, lain halnya dengan Nova yang cenderung mengambil posisi ofensif dalam kasus ini.

“Mereka ini kan, sengaja merekam aktivitas seksual mereka. Video itu tidak akan pernah ada jika mereka tidak merekamnya. Bagaimana mungkin mereka hanya sebagai korban?”²⁹

Bagi Tabloid Nova, Ariel, Luna dan Cut Tari tidak mungkin diposisikan sebagai korban mengingat merekalah yang memproduksi dokumentasi *illegitimate sexual activity* tersebut. Namun yang menjadi polemik, dari kesemua tabloid tersebut tidak ada yang menyuarakan secara gamblang siapa yang bisa divonis menjadi pelaku. Meskipun hingga artikel tersebut dipublikasikan Ariel sudah ditetapkan menjadi tersangka dan menjadi tahanan tetap, media massa juga belum merujuk pada pelaku utama yang patut dihukum.

Menurut saya, setidaknya para tabloid itu masih mengusung asas praduga tak bersalah. Walaupun di setiap artikel memiliki nada-nada yang memihak, namun belum ada yang mengutuk atau menjustifikasi salah satu individu yang ditetapkan sebagai pelaku sebelum hukum menyatakan demikian. Sehingga, dari perdebatan ini bisa disimpulkan jika media massa berada pada posisi mediator dalam kasus ini, mereka menyiarkan, menambahi sedikit bumbu agar sedap, namun tidak langsung menjustifikasi.

Namun, media massa tidak sepenuhnya lepas tangan dalam mendengungkan pemberitaan tersebut sehingga menjadi penting bagi publik yang mengonsumsinya. Tabloid Bintang menyadari benar kalau diri mereka turut andil dalam kasus ini, sebagai “pelaku” penyebaran: “Kasus ini jelas tidak bisa disepelekan. Apalagi media memberitakan dengan gencar. Masyarakat disuguhi gambar, tontonan yang mendorong rasa ingin tahu”. Ketiga tabloid lain, juga merasa bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh media massa semakin mendorong rasa ingin tahu masyarakat, utamanya anak-anak penggemar ketiga selebritas tersebut, sehingga memposisikan media massa sebagai salah satu pelaku

²⁹ Wawancara dengan pengacara dan ketua LSM Hajar, Farhat Abbas. Dikutip dari: Tabloid Nova No. 1165/XXIII 21-27 Juni 2010. Hal. 8.

penyebaran video tersebut. Hal ini juga diafirmasi oleh Tifatul Sembiring yang merasa media massa terlalu sering menampilkan peristiwa tersebut.

Di sisi lain, dalam memposisikan pelaku dan korban dalam ulasan rubriknya, para tabloid ini memiliki kecenderungan yang seragam. Yang pertama, mereka sepakat meletakkan masyarakat, utamanya anak-anak, sebagai koerban dari peristiwa ini. Yang kedua, semua sepakat bahwa para pelaku *illegitimate sexual activity* memiliki andil dalam peristiwa tersebut, walaupun posisinya tidak dapat dikatakan sebagai pelaku atau korban. Yang terakhir, seluruh tabloid menyepakati bahwa *illegitimate sexual activity* adalah perbuatan yang salah. Jika melakukannya maka akan menerima konsekuensi negatif baik itu formal (dituntut secara hukum) maupun informal (dikucilkan, disalahkan dan dicela oleh publik) karena menyalahi norma kesusilaan yang dikonstruksi oleh identitas nasional sebagai anak bangsa.

Posisi “Saksi Ahli”³⁰

Menurut Littlejohn (2000)³¹, Foucault menyatakan bahwa setiap periode peradaban manusia memiliki perbedaan sudut pandang dalam melihat dunia, yang ia sebut sebagai struktur konseptual (*conceptual structure*), yang menentukan pendefinisian kebenaran melalui pengetahuan yang dianggap sudah seharusnya (*the nature of knowledge*) pada masa itu. Sehingga, setiap pengetahuan pasti memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan periode peradaban di mana ia digunakan. Foucault menyebutnya sebagai *epistémé* atau formasi diskursif (*discursive formation*).

Maka dari itu, untuk melanggengkan kekuasaan melalui formasi wacana yang beredar, maka harus ada kontrol terhadap wacana itu sendiri. Foucault menyebutnya sebagai ‘*rarefaction of the speaking subjects*’ dengan tiga cara utama, yaitu memberikan suatu kualifikasi tertentu agar individu dapat diakui sebagai subjek yang berbicara, terkait dengan dimensi ruang dan waktu di mana wacana tersebut disampaikan. Yang kedua dengan membatasi kelompok tertentu yang dapat diakui sebagai subjek, serta yang terakhir adalah legitimasi secara formal terhadap subjek yang berbicara. Dan legitimasi tersebut hanya bisa didapatkan dengan satu cara, pendidikan formal.

Sehingga, individu yang memiliki legitimasi sebagai subjek yang berbicara pada akhirnya memiliki akses terhadap peredaran wacana. Seperti yang diungkapkan oleh Foucault (1975)³² berikut ini:

But we know very well that, in its distribution, in what it permits and what it prevents, it follows the lines laid down by social differences, conflicts and struggles. Every educational system is a political means of maintaining or modifying the appropriation of discourses, with the knowledge and power they bring with them.

³⁰ Istilah saksi ahli saya gunakan untuk merujuk pada individu yang dianggap tabloid memiliki kredibilitas untuk membahas peristiwa ini dari sudut pandang kompetensi masing-masing.

³¹ Untuk detailnya, lihat: Littlejohn, Stephen W (2000) “Critical Theories” dalam *Theories of Human Communication*, London: Wasdworth Publishing. Hal. 237-238.

³² Untuk detailnya, lihat: Foucault, Michel (1968) “Discourse, Power and Knowledge”, dalam *The Will to Truth*. New York: Tavistock Publication. Hal. 127.

Dapat diambil kesimpulan bahwa pengetahuan (*knowledge*) adalah gerbang untuk meraih kekuasaan (*power*) dalam merumuskan dan melanggengkan ideologi dominan bagi suatu tatanan masyarakat melalui proses komunikasi yang memproduksi wacana.

Itulah yang tergambar jelas dalam pendefinisian kebenaran dalam kasus *illegitimate sexual activity* yang divideoan tersebut. Para ahli telematika seperti Roy Suryo dan Abimanyu dijadikan garda depan dalam pembuktian kebenaran sekaligus menjustifikasi secara moral para pelaku dan aktivitas yang mereka lakukan. Para psikolog berlomba-lomba membuat pernyataan yang melegitimasi kebenaran versi mereka mengenai realita *illegitimate sexual activity* yang dilakukan oleh selebriti. Para pengacara, juga dengan standar kebenarannya secara judicial, turut memposisikan *illegitimate sexual activity* dalam diskursus seksualitas nasional.

“Setelah lihat video tersebut dari bukti yang dipegang polisi, saat itu pula saya merasa Luna berbohong menyatakan video itu rekayasa. Tadinya saya kira Luna jujur kesaya, menyatakan video itu rekayasa. Setelah melihat video itu, saya nyatakan, video itu asli 100%. Tidak mungkin rekayasa”³³.

Menjadi problematis, manakala saksi ahli yang dijadikan pelegitimasi kebenaran dalam kasus tersebut tidak hanya sekedar memberikan pendapat objektif mengenai asli tidaknya video yang beredar. Namun mereka turut menjustifikasi moralitas para pesertanya serta memberikan alternatif hukuman bagi mereka. Seperti yang dilakukan oleh Roy Suryo, yang merasa khawatir jika peredaran video ini bisa merusak moral bangsa.

Selain melihat dari sudut pandang moralitas, berbagai saksi ahli dihadirkan untuk mengulas peristiwa ini dari berbagai sudut pandang. Seperti yang dilakukan oleh tabloid Bintang yang menggunakan Effendi Ghazali, seorang pengamat media, sebagai narasumber utamanya.

“Yang bisa menjerat Ariel dan Luna adalah kenyataan lain bahwa mereka melakukan hubungan seks sebelum menikah. Mereka bisa terjatuh undang-undang perzinahan”³⁴.

Ghazali memberikan pernyataan bahwa, *illegitimate sexual activity* yang didokumentasi dan disebarluaskan pada dasarnya bukan faktor terpenting. Yang lebih penting adalah aktivitas seksual di luar konsep pernikahan yang dilegitimasi oleh Negara. Pelanggaran, pada dasarnya dilakukan oleh para anak bangsa ini karena aktivitas seksual diatur sepenuhnya oleh Negara. Sebagai pengamat media Ghazali mengambil posisi komentator yang menyatakan bahwa hukum berpihak pada individu yang mematuhi hukum Negara dalam melakukan aktivitas seksual.

³³ Wawancara dengan ahli telematika, Roy Suryo. Dikutip dari : Tabloid Nova No. 1165/XXIII 21-27 Juni 2010. Hal. 4.

³⁴ Wawancara dengan pakar komunikasi Effendy Gozali. Dikutip dari: Dikutip dari: Tabloid Bintang Edisi 997 Tahun XX Minggu Ketiga Juni 2010. Hal.2.

Para tabloid ini juga menyoroti perilaku para pemain video ini dari sudut pandang psikologis. Sudut pandang psikologis yang digunakan pun diambil dari dua sisi. Sisi pertama adalah psikologi populer dan sisi kedua adalah sudut pandang psikologi agama.

“Ariel itu *superstar, naughty boy*. Di dalam dunia pergaulan, *naughty boy hard to resist*. Saya enggak akan bilang dia *psycho* ... Wahai Ariel, Luna, Cut Tari, bangsa Indonesia itu bangsa yang permisif dan pardonis, mudah memaafkan serta *nrimo*. Kalau Anda berulang-ulang tidak mengaku, orang bisa kesal”³⁵.

Mengacu pada kasus video porno yang pelakunya mirip Ariel dan Luna, Psikiater Dadang Hawari menduga si pelaku pria menderita 3 penyimpangan seks sekaligus, *narsisme, ekshibisionist* dan *satirisme* ... “Sekarang begini, pasangan suami istri melakukan seksual memang hal yang sah di agama. Masalahnya timbul karena dilakukan bukan dengan pasangan. Lalu semakin menjadi masalah lagi, ketika video tersebut bocor ke publik”³⁶.

Narasumber yang dipilih oleh Tabloid Nova, Prasantyo, mewakili sudut pandang psikologi populer menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Ariel bukanlah hal yang patologis di dalam lingkungan sosial. Yang menjadikan seorang Ariel menjadi bergonta-ganti pasangan dalam melakukan *illegitimate sexual activity* adalah kepribadiannya yang sulit ditolak oleh para selebriti perempuan Indonesia.

Berbeda lagi sudut pandang yang digunakan oleh Dadang Hawari. Menurut Dadang, apa yang dilakukan oleh para pemain video tersebut, utamanya adalah pemeran pria, merupakan suatu hal yang patologis. Dadang bahkan menjustifikasi pemain pria dalam video tersebut sebagai individu yang menderita penyimpangan seksual. Dadang bahkan tidak ragu untuk menyebut Ariel sebagai “penderita” penyimpangan seksual dan menyampaikan bahwa pokok permasalahan dari peristiwa itu adalah terjadinya *illegitimate sexual activity*. Masalah tersebut menjadi makin besar manakala publik telah mencium permasalahan tersebut.

Sementara itu, tabloid Genie mengambil *angle* berbeda dengan membahas masalah ini dari sudut pandang agama. Menggunakan Ketua MUI, Amidhan, sebagai narasumber utama

“Dari sisi agama sudah jelas itu perbuatan dilarang. Dosa besar. Tidak bisa ditolerir. Tapi kalau agama kan hukumannya di akhirat, ya... Karena ini kejahatan sosial yang sangat merusak masyarakat. Video itu kan bisa diakses jutaan orang dan akan merusak moral jutaan orang”³⁷.

³⁵ Wawancara dengan ahli Ilmu Hypnotherapy Psikologi, Mardigu Wawiek Prasantyo. Dikutip dari Tabloid Nova No. 1165/XXIII 21-27 Juni 2010. Hal. 7.

³⁶ Wawancara dengan Psikiater dan Guru Besar FKUI, Dadang Hawari. Dikutip dari: Tabloid Wanita Indonesia No. 1069 21-27 Juni 2010. Hal. 31.

³⁷ Wawancara dengan ketua MUI, Amidhan. Dikutip dari: Tabloid Genie Edisi 50 Tahun ke VI, 21-27 Juni 2010. Hal 5.

Setiap ahli dari masing-masing bidang yang dianggap memiliki legitimasi untuk menjustifikasi kasus tersebut turut memberikan perspektifnya mengenai kebenaran dalam konteks diskursus *illegitimate sexual activity* yang didokumentasikan tersebut. Apakah mengkategorisasikan mereka sebagai pembohong, pezinah atau bahkan memiliki kelainan seksual.

Para tabloid Indonesia mengambil *angle*-nya masing-masing dalam mendefinisikan para pemain dari dokumentasi seksual tersebut. Dan kesepakatan yang timbul dari pemberitaan tersebut adalah para pemain dianggap melanggar prinsip *good sex* heteronormativitas dari perspektif manapun. Mulai dari perspektif agama, sosial hingga psikologikal. Atau dengan kata lain, tabloid masih mengikuti narasi besar heteronormatif yang meletakkan *illegitimate sexual activity* yang didokumentasikan sebagai diskursus seksualitas yang menyimpang dan harus dibenahi. Hal ini senada dengan konstruksi identitas nasional bangsa yang diartikulasikan menggunakan bahasa maskulin-heteroseksual yang meletakkan para anak bangsa sebagai pihak yang melakukan pengrusakan identitas bangsa.

Sanksi bagi Seksualitas Tak Berlegitimasi

Selain membahas dari berbagai sudut pandang, para tabloid Indonesia ini membeberkan beberapa sanksi yang diberikan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung pada para “pemeran” video *illegitimate sexual activity* tersebut. Walaupun harusnya tabloid-tabloid ini memaparkan sanksi yang diberikan masyarakat secara objektif, namun “bumbu-bumbu” justifikasi masih muncul di sana-sini. Seperti pada tabloid Bintang yang secara terus terang menyatakan bahwa *illegitimate sexual activity* adalah salah jika dilihat dari sudut pandang moralitas.

Secara moral, apa yang mereka lakukan salah. Pencekalan dimana-mana, hujatan banyak tokoh dan masyarakat luas sudah menjadi sanksi moral yang harus diterima ... Bolehlah mereka untuk sementara terbebas dari sanksi hukum. Namun sanksi moral sudah mereka terima. Di beberapa daerah, sudah kena cekal. Gelombang unjuk rasa juga mendera. Dampak dari video tersebut juga dirasakan karyawan Luna yang terpaksa dirumahkan³⁸.

Tabloid Bintang memberikan bukti bagi justifikasi mereka dengan memaparkan fenomena pencekalan bagi ketiga selebritis tersebut di beberapa wilayah. Lebih jauh lagi mereka memaparkan bahwa karena video tersebut Luna harus menghentikan usahanya yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja dengan karyawan-karyawannya.

Tabloid Nova malah memaparkan lebih detail lagi mengenai sanksi sosial yang dialamatkan pada ketiga selebritis tersebut. Pergerakan masyarakat mulai dari pencekalan di dunia maya hingga pengambilan hak kependudukan dijelaskan secara lengkap dari hari ke hari.

Selasa, 08/6; Gerakan Boikot Ariel-Luna Maya-Cut Tari mulai didengungkan di Facebook ... Kamis 10/6; Ariel Cs dicekal di Makassar.

³⁸ Dikutip dari: Tabloid Bintang Edisi 997 Tahun XX Minggu Ketiga Juni 2010. Hal.2.

Selebaran boikot Ariel-Luna-Cut Tari beredar luas di seluruh pelosok Makassar ... Jumat 11/6; Luna Maya dan Cut Tari resmi diberhentikan dari seluruh program di Trans Corp, Ariel dan Peterpan dicekal di Semarang ... Rabu 16/6 Ariel dicekal di Bandung dan Mojokerto. Walikota Bandung, Dada Rosada, didesak sejumlah ormas untuk mencabut Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bandung milik Ariel ... Kamis 17/6; Café 7 Sins milik Luna di Bandung dan kediaman Ariel di Antapani didatangi massa Front Pembela Islam (FPI).³⁹

Menganalisis dari tulisan tabloid mengenai sanksi yang diberikan oleh masyarakat bagi anak bangsa pelaku *illegitimate sexual activity* tersebut ternyata sanksi tidak hanya diterapkan di dunia maya dimana video tersebut beredar. Lebih ekstrem lagi pada saat masyarakat, yang diwakili oleh beberapa ormas di Bandung, meminta pencabutan hak kependudukan Ariel sebagai WNI dengan mencabut KTPnya. Selain beberapa ormas, FPI yang cukup terkenal dengan sekap terjangnya dalam memberangus hal-hal yang mereka kategorikan sebagai merusak “agama” merasa perlu untuk mendatangi teritori privat para selebritis ini untuk memberikan ancaman.

Dari pemberitaan tersebut dapat disaksikan secara gamblang dimana letak diskursus *illegitimate sexual activity* dalam jalinan diskursus seksualitas di Indonesia. Secara jelas kegiatan tersebut dikategorikan sebagai kegiatan immoral yang harus mendapat sanksi moral, antara lain pengucilan dari masyarakat hingga pemboikotan kedatangan. Selain dari sudut pandang sanksi sosial, ada pula Tabloid Wanita Indonesia dan Tabloid Bintang yang lebih menyoroti penerapan sanksi yang harus ditekankan para orang tua anak-anak penggemar selebritis yang menjadi pelaku *illegitimate sexual activity* tersebut.

“Katakan pada anak-anak, bahwa si artis A atau B yang sedang dibicarakan itu telah melakukan kesalahan. Apa yang diperbuat mereka itu melanggar norma agama dan juga sosial. Karena mereka berhubungan selayaknya suami-istri, tetapi tidak dengan pasangan resminya. Selain itu, perilaku merekam aktivitas seksual dengan kamera pun menunjukkan kecenderungan tidak normal... Saya bilang ke dia, mama sih tidak masalah, apakah jawaban kamu benar atau tidak, yang pasti mama katakan kalau perbuatan mereka itu salah. Dan kita sudah tahu konsekuensinya seseorang yang salah, maka akan mendapat hukuman.”⁴⁰

Selain itu kedua tabloid tersebut juga menyarankan bagi para orang tua untuk menanamkan kepada anak-anak mereka bahwa *illegitimate sexual activity* merupakan perbuatan yang melanggar norma agama serta norma sosial. Lebih jauh lagi, para orang tua diwajibkan memberikan penekanan bahwa untuk setiap pelanggaran tersebut akan menimbulkan konsekuensi buruk berupa hukuman. Selain itu, hukuman yang lebih berat akan diberikan jika aktivitas tersebut didokumentasikan serta disebarluaskan.

³⁹ Dikutip dari Tabloid Nova No. 1165/XXIII 21-27 Juni 2010. Hal. 9.

⁴⁰ Wawancara dengan Dra Yuli Suliswidiawati, Mpsi. Konselor dan Owner BKP (Biro Konsultasi Psikologi) Westeria. Dikutip dari Tabloid Bintang Edisi 997 Tahun XX Minggu Ketiga Juni 2010. Hal.18.

Walaupun hampir semua tabloid berusaha menjelaskan pelanggaran norma moral, sosial dan agama yang mendapat sanksi dari masyarakat, Tabloid Bintang melakukan hal yang berbeda dengan menabrakkan komentar-komentar masyarakat melalui rubrik khusus yang diberi judul “Komentar Anda Tentang: Beredarnya Video Seks Mirip Ariel-Luna-Cut Tari”. Halaman depan sebelum rubrik menampilkan komentar dari para penggemar selebritis tersebut.

Ada Lunatic, fans fanatic Luna Maya, dan ada pula Arluners, klub khusus penggemar pasangan Ariel dan Luna. Apakah mereka kehilangan simpati setelah kasus ini merebak? Ternyata tidak. Fans Luna maupun Ariel, tetap setia. Malah dukungan fans hari demi hari terus bertambah, melalui Facebook dan Twitter⁴¹.

Apa pun yang terjadi aku tetep cinta Arlun. Hiduuuuup arluuuun, jangan menyerah, hidup memang penuh cobaan. (085711909xxx)⁴²

Para fans setia ini juga turut memberikan dukungannya pada rubrik “Komentar Anda Tentang”. Mereka merasa bahwa sanksi moral yang dibebankan masyarakat bagi para pelaku tersebut tergolong berlebihan dan membandingkan dengan kasus yang sama yang terjadi di luar negeri namun tidak menjadi sebuah wacana besar hingga melibatkan jalur hukum.

Namun, tidak semua individu merasa perlu memberikan dukungan kepada para partisipan video tersebut. Mereka memberikan penekanan bahwa *illegitimate sexual activity* masih menjadi hal yang tabu di Indonesia dan para pelakunya berhak mendapat hukuman baik itu berupa sanksi moral hingga hukuman di akherat.

Hari gini bikin video “gituan”. Sebenarnya yang pelacur itu mereka bukan wartawan (085693520xxx)⁴³

Apa pun alasannya, baik pengedar, pembuat dan pelaku video seks itu benar-benar keterlaluan, enggak tahu malu, norma agama dan budaya pun diabaikan. (085330090xxx)⁴⁴

Menjadi bintang hebat tapi kelakuan bejat. Pada insaf, mencari bekal ke akherat. (081310243xxx)⁴⁵

Pemilihan komentar-komentar yang dipublikan ini berada di tangan tabloid, sehingga asumsinya, apa yang dipublikasikan itulah yang dianggap sebagai pantas. Melihat dari tiap komentar, bisa diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya kegiatan seksual yang tidak dilegitimasi merupakan sebuah pelanggaran norma moral, agama dan budaya sehingga para pelakunya mestinya menerima konsekuensi sebagai pertanggungjawabannya terhadap perilaku tersebut.

⁴¹ Dikutip dari Tabloid Bintang Edisi 997 Tahun XX Minggu Ketiga Juni 2010. Hal.2-3.

⁴² Dikutip dari Ibid. Hal 45.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

Namun, tidak hanya sanksi moral, sanksi represif yang harusnya mendapat teguran dari amnesti internasional seperti pencabutan hak kependudukan serta pelanggaran teritorial privat juga diberikan kepada para pemain video tersebut. Namun, kesemua eksekutor sanksi tersebut tidak memiliki wewenang yang dilegitimasi oleh negara. Hal ini menimbulkan suatu diskursus mengenai sekelompok “polisi moral” yang dianggap memiliki veto penuh terhadap penyelenggaraan eksekusi bagi pihak-pihak yang dikategorikan sebagai “penjahat” moral. Dan media massa, yang dalam konteks tulisan ini adalah tabloid, turut memperteguh kondisi tersebut.

Negara sebagai Puncak Legitimasi Seksualitas

Diskursus negara integralistik yang diusung oleh Orde Baru untuk mengkonstruksi identitas nasional ternyata masih direproduksi serta dijadikan kerangka pikir utama negara dalam mengkonstruksi kehidupan masyarakat Indonesia. Sehingga, pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung dengan pemerintah, yang menjadi “bapak” negara, merasa memiliki urgensi untuk turut campur mengkonstruksi pemikiran publik mengenai kasus ini. Tidak hanya Menteri Komunikasi dan Informatika yang memiliki keterkaitan dengan peredaran informasi, baik itu cetak maupun elektronik, mulai dari Presiden hingga Ketua RT merasa perlu untuk berkomentar dan meluruskan pemikiran bangsa dalam memandang dan mencerna kasus ini. Atau dengan kata lain untuk memberikan arahan bagi “anak-anaknya”.

Ketua MUI yang berbicara dari sudut pandang agama bahkan menyatakan perlunya para anak bangsa yang menjadi pelaku untuk segera “diamankan” karena mereka akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. “Pengamanan” itu juga bukan bentuk pengamanan sembarangan, Ketua MUI mendesak kepolisian sebagai *Repressive State Apparatus* untuk bertindak cepat dalam memberikan hukuman bagi para pemain video tersebut.

“Pernyataan dia (Ariel, red) yang menyatakan korban berarti ia mengakui itu (video) ada. Mengakui itu benar. Dan para ahli menyatakan video ini bukan rekayasa. Menurut saya, polisi jangan lamban seperti sekarang ... Bagi kita, polisi seharusnya melihat dampak yang besar di masyarakat. Polisi harus lebih tegas dan tidak hanya mengatakan mereka sebagai korban”⁴⁶.

Kepolisian sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah dianggap sebagai pihak yang paling memiliki legitimasi untuk mengkonstruksi pandangan masyarakat mengenai kasus ini yang bisa dikategorikan sebagai “kejahatan”. Para pelaku juga tidak memiliki hak untuk mendeklarasikan diri mereka sebagai korban mengingat dampak yang terlalu besar yang mereka timbulkan pada masyarakat.

Tidak hanya Ketua MUI yang menganggap polisi sebagai legitimasi puncak dalam menindak para pelaku video tersebut, Ketua RT di kediaman Luna Maya juga merasa perlu untuk berlaku sebagai pihak berwenang dan menertibkan perilaku mereka.

⁴⁶ Wawancara dengan Ketua MUI, Amidhan. Dikutip dari Tabloid Genie Edisi 50 Tahun ke VI, 21-27 Juni 2010. Hal 5.

Ruswandhi juga sempat “menertibkan” Luna dan Ariel. Mereka, katanya, “ditangkap” komandan regu keamanan kompleks. “Ia pernah datang bersama Ariel dini hari. Saya punya danru yang seorang tentara pernah menahan KTP Ariel sama Luna Maya..Ariel sering menginap di sini,” ungkapnya.⁴⁷

Tindakan Ariel dan Luna yang tidur di bawah satu atap, yang walaupun dilakukan tepat di atas properti pribadi, namun masih dalam teritori kekuasaan rumah “Bapak” yang oleh negara diwakilkan pada Ketua RT, dianggap menyalahi identitas bangsa yang menempatkan hal tersebut sebagai melanggar norma moral. Sehingga Pak RT merasa perlu memanggil komandan regu keamanan, yang seorang tentara, untuk “menangkap” keduanya dan kemudian menahan KTP Ariel.

Menkominfo, sebagai perwakilan dari Presiden, yang disertai tanggung jawab pada peredaran informasi di rumah “keluarga besar Indonesia” pun merasa perlu memberikan pengarahan kepada para pelaku, penonton sekaligus pengedar informasi ini.

Padahal, tekanan dari berbagai kalangan agar masalah ini segera dituntaskan semakin kuat saja. Bahkan Presiden SBY pun akhirnya ikut bersuara mengenai kasus ini. Intinya, SBY mendukung pemeriksaan hingga tuntas, antara lain demi menjaga moral bangsa ini⁴⁸.

“Kalau bisa ada lembaga yang memberikan *award* untuk Ariel sebagai orang yang berhasil merusak generasi bangsa sepanjang sejarah”⁴⁹.

“Masalah video itu cukup menguras perhatian publik. Kalau itu benar mereka, bukan saya saja yang kecewa. Mereka ini idola puluhan juta jiwa anak muda Indonesia. Dan ini bisa menjadi preseden buruk”⁵⁰...

Menkominfo Tifatul Sembiring meminta Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari membantu kepolisian dengan mengaku terus terang, “Saya imbau supaya mereka bersikap *gentle*. Videonya ada dan tersebar luas, tapi tidak ada yang mengaku bertanggung jawab”⁵¹.

“Imbauan” diberikan oleh menkominfo sebagai perwakilan dari “Bapak Negara” kepada para anak bangsa yang melakukan *illegitimate sexual activity* untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bentuk tanggung jawab macam apa yang dituntut tidak dijelaskan secara eksplisit, namun “Bapak” Menteri menghimbau mereka untuk setidaknya mengaku dan memohon maaf kepada

⁴⁷ Wawancara dengan Ruswandhi Tahir, Ketua RT 01 RW 016 Pondok Indah. Dikutip dari Tabloid Genie Edisi 50 Tahun ke VI, 21-27 Juni 2010. Hal. 4.

⁴⁸ Dikutip dari: Tabloid Nova No. 1165/XXIII 21-27 Juni 2010. Hal.3.

⁴⁹ Wawancara dengan Al Muzamil, Anggota Komisi I DPR RI. Dikutip dari: Tabloid Bintang Edisi 997 Tahun XX Minggu Ketiga Juni 2010. Hal.4.

⁵⁰ Wawancara dengan Tifatul Sembiring, Menkominfo Kabinet Indonesia Bersatu 2. Dikutip dari: Tabloid Bintang Edisi 997 Tahun XX Minggu Ketiga Juni 2010. Hal.4.

⁵¹ Wawancara dengan Tifatul Sembiring, Menkominfo Kabinet Indonesia Bersatu 2. Dikutip dari: Tabloid Genie Edisi 50 Tahun ke VI, 21-27 Juni 2010. Hal. 5.

Bangsa Indonesia. Utamanya kepada adik-adik mereka yang menjadikan para selebritis ini sebagai “*role model*”. Preseden yang disampaikan oleh Tifatul bisa jadi mengarah pada perusakan identitas nasional yang sudah dikonstruksi bertahun-tahun mengenai *illegitimate sexual activity*.

Untuk itulah, militer, yang dalam hal ini diwakili oleh pihak kepolisian menjadi alat negara dalam menegakkan moral bangsa. Dengan kata lain, *illegitimate sexual activity*, menurut “Bapak” adalah tindakan perusakan moral bangsa, sehingga untuk menggesernya ke tepi diskursus seksualitas diperlukan *repressive state apparatus*, yang dalam hal ini adalah polisi.

Dari semua artikel yang dimuat oleh tabloid-tabloid tersebut, negara diposisikan sebagai institusi puncak yang memiliki legitimasi dalam mendefinisikan posisi tiap pemain dalam kerangka narasi ini. Negara pula yang dianggap sebagai sutradara yang harus bertanggungjawab atas “kenakalan” para pemainnya untuk kemudian ditindak sesuai dengan diskursus seksualitas yang telah direproduksinya terus-menerus. Hal ini memperkuat diskursus heteronormativitas yang dianut oleh Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Rubin⁵²:

...Sexuality that is “good”, “normal” and “natural” should ideally be heterosexual, marital monogamous, reproductive and non-commercial. It should be coupled, relational, within the same generation and occur at home. It should not involve pornography, fetish objects, sex toys of any sort, or roles other than male and female. Any sex that violates these rules is “bad”, “abnormal”, or “unnatural”. Bad sex may be homosexual, unmarried, promiscuous, non-procreative, or commercial. It may be masturbatory or take place at orgies, may be casual, may cross generational lines, and may take in “public”, or at least in the bushes or the baths. It may involve the use of pornography, fetish objects or unusual roles.

Maka setiap aktivitas seksual yang berada di luar ranah *good sexuality* harus “diluruskan” oleh institusi puncak yang memiliki legitimasi dalam menata diskursus seksualitas, yang dalam konteks heteronormativitas adalah maskulin. Dengan kata lain, jika ditarik lebih jauh lagi dalam tataran Indonesia, simbol maskulinitas dalam asas kekeluargaan bangsa terletak pada Presiden dan aparatnya sebagai “Bapak” bangsa yang memiliki legitimasi pendefinisian seksualitas yang “patut”, menggunakan kerangka nasional maskulin, bukannya multikultural.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa diskursus *illegitimate sexual activity* yang didokumentasikan, masih menjadi hal yang problematis bagi tabloid Indonesia. Melihat dari perspektif multikulturalisme kritis, tabloid Indonesia masih berada pada posisi hegemoni ideologi dominan negara yang menganut heteronormativitas. Pendefinisian

⁵² Rubin, Gayle (1984) “*Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality*”. Boston and London: Routledge. Hal. 14.

fenomena tersebut diambil dari sudut pandang negara yang meletakkan diskursus seksualitas di periphery wacana kebangsaan. Sehingga *illegitimate sexual activity* yang didokumentasikan tersebut dijadikan indikator moralitas bangsa sekaligus, sebuah aib yang harus direpresi secara hukum publik karena mengakibatkan “kerusakan” moral bangsa.

Terkait dengan konstruksi identitas nasional yang direproduksi terus-menerus melalui wacana kebangsaan menggunakan sistem penandaan, media massa sebagai agen dari sistem penandaan negara menjalinkan diskursus seksualitas tanpa legitimasi tersebut sebagai pelanggaran yang sudah selayaknya diberikan hukuman. Media massa sebagai *ideological state apparatus* memainkan perannya dalam mengkonstruksi pandangan publik mengenai peristiwa tersebut sejalan dengan wacana kebangsaan. Para narasumber yang digunakan oleh tabloid untuk mengulas permasalahan ini juga didasarkan pada legitimasi negara melalui kredibilitas nara sumber tersebut.

Setiap tabloid yang membahas kasus tersebut, belum mampu memperluas pandangan mereka di luar diskursus tersebut sehingga pemberitaan yang dipublikasikan cenderung seragam. Namun, tidak bisa dikatakan mutlak demikian, karena tabloid Indonesia mulai berani menampilkan suara-suara marginal yang dalam hal ini diwakili oleh para pemeran video tersebut. Sangat disayangkan, ketika masyarakat sebagai pihak yang bersinggungan langsung dengan dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut tidak mendapatkan tempat untuk berbicara. Dan yang terakhir, menurut saya pemberitaan dari para tabloid tersebut menjadi berlebihan mengingat pengulangan dan peletakkannya sebagai isu utama, karena hal ini berimplikasi pada konstruksi isu yang dianggap penting bagi publik, sehingga masyarakat melupakan isu-isu lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimi, Moh Yasir. (2004). *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial: Dari Wacana Bangsa Hingga Wacana Agama*. Jogjakarta: LKiS.
- Anderson, Benedict. (1983) *Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism*, London: Verso.
- Butler, Judith (1999) “Gender Trouble” dalam *Feminism and The Subversion of Identity*. London : Routledge.
- Fiske, John (1996) “Communication, Meaning and Sign” dalam *Introduction to Communication Studies*. London: Routledge.
- Foucault, Michel (1968) “Discourse, Power and Knowledge”, dalam *The Will to Truth*. New York: Tavistock Publication.
- Hall, Stuart (2002) “The Work of Representation” dalam Hall, Stuart (editor). 2002. *Representation; Cultural Representations and Signifying Practices*. London: Sage Publication.

Haryanto, Ignatius (2006) *Aku Selebriti Maka Aku Penting*. Jogjakarta: Penerbit Bentang.

Ibrahim, Idi Subandy (2007) *Budaya Populer Sebagai Komunikasi: Dinamika Popscape dan Mediascape di Indonesia Kontemporer*. Bandung : Jalasutra.

Kellner, Douglas (1995) *Media Culture*. New York: Routledge.

Littlejohn, Stephen W (2000) "Critical Theories" dalam *Theories of Human Communication*, London: Wasdworth Publiching.

McLaughlin, Linda (2000) *The Language of Magazines*. New York: Routledge.

McQuail, Dennis (2000) "Theory of Media and Theory of Society" dalam *Mass Communication Theories*, London: Sage Publication.

Rubin, Gayle (1984) "*Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality*". Boston and London: Routledge.

Strinati, Dominic (2007) *Popular Culture: Pengantar Menuju Teori Budaya Populer*. Bandung: Penerbit Jejak.

Suryakusuma, Julia I (1991) "Seksualitas dalam Pengaturan Negara" dalam Hadiz, Liza (editor). (2004) *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru: Pilihan Artikel Prisma*, Jakarta: LP3S.

Tabloid Bintang. Edisi 997 Tahun XX Minggu Kedua Juni 2010.

Tabloid Genie Edisi 50 Tahun ke VI, 21-27 Juni 2010.

Tabloid Nova No. 1165/XXIII 21-27 Juni 2010.

Tabloid Wanita Indonesia No. 1069 21-27 Juni 2010.